

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Arikunto, Suharismi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Arliman S, Laurensius. 2019. *Lembaga-lembaga Negara (Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Badan Pengawas Pemilu. 2015. *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, Dan Sistem Presidensiil*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.
- Budiarjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- CST Kansil. 2000 *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif DPR, DPRD, dan DPD*, Jakarta, Visi Media Pustaka.
- Hartono, Hadi. 1996. *Hakikat dan Muatan Filsafat dalam Pancasila*, Yogyakarta, Kanisius
- Jasin, Johan. 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, CV Budi Utama.

- Manan, Prof. DR. H. Bagir. 2005. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1995 Baru*, FH-UII Press Yogyakarta
- Manan, Prof. DR. H. Bagir. 2014. *Hukum Positif Indonesia*, FH-UII Press Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, cetakan ketujuh.
- Muttaqin, Entol Zaennal. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, Serang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Piliang, Indra J. dan Bivitri Susanti. 2016. *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta, Kelompok DPD RI di MPR RI.
- Ridho, M. Zainor. 2015. *Pengantar Ilmu Politik*, Serang, LP2M UIN SMH Banten
- Saebani, Beni Ahmad dan Javid Zia Rahman Haqiq. 2016. *Ilmu Negara Dan Teori Negara*, Bandung, Pustaka Setia.
- Smith, Rhona K.M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung.
- Sumirat, Iin Ratna Sumirat. 2018. "Perlindungan Hak perempuan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14 No. 2.
- Widayati, Sri. 2019. *Hak Asasi Manusia*, Tangerang, LOKA AKSARA.
- Widayati. 2015. "*Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia*", *MMH*, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015

SKRIPSI

- Skripsi Harsa, Aldo Putra. 2014. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012”*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Skripsi Rizal, Khaerul, 2019, *Pencalonan Fungsionaris Partai Politik Sebagai Anggota DPD RI (Analisis Putusan MA No. 65 P/HUM/2018)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Skripsi Sari, Afifa Putri Ratna, 2019, *Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pngurus Partai Politik Sebagai Pemilu Anggota DPD Perspektif Fiqh Siyasa*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

UNDANG-UNDANG

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI-2008
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 pasal 12 huruf I tentang larangan calon anggota DPD bebas dari Partai Politik.
- Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, pasal 63 huruf b.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995, Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAK Asasi Manusia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

INTERNET

<http://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14464> diakses pada tanggal 19 November 2021.

<http://muhammadazzikra15.blogspot.com/2016/03/teori-pemilu.html?m=1> diakses pada tanggal 3 Maret 2022, Pukul 18.37 WIB.

<http://www.dpd.go.id/Home/alatkelengkapan/10/badan-kerja-sama-parlemen>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020, Pukul 14:45 WIB.

<http://www.dpd.go.id/Home/alatkelengkapan/12/badan-akuntabilitas-publik>, diakses pada tanggal 28 September 2022, Pukul 20:57 WIB.

<http://www.dpd.go.id/Home/alatkelengkapan/15/badan-urusan-legislasi-daerah>, diakses pada tanggal 28 September 2020, pukul 20:50 WIB.

<http://www.dpd.go.id/Home/alatkelengkapan/8/panitia-urusan-rumah-tangga>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022, Pukul 14:25 WIB.

<http://www.dpd.go.id/pimpinan-dpd/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020, pukul 20:40 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/12/05250071/bawaslu-putuskan-oesman-sapta-tetap-tak-bisa-jadi-calon-anggota-dpd>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/12/05250071/bawaslu-putuskan-oesman-sapta-tetap-tak-bisa-jadi-calon-anggota-dpd>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/12522521/kabulka-n-gugatan-oso-ma-diminta-lebih-jeli>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021

<https://www.antaraneews.com/berita/766225/ma-pasal-60a-pkpu-tidak-berkepastian-hukum>, diakses pada tanggal Desember 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114162818-32-346553/oso-menang-di-ptun-kpu-diminta-terbitkan-sk-dct-dpd-ri-baru>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c3c50d44c6b2/pencalonan-anggota-dpd-kpu-disarankan-menempuh-upaya-ini>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021.